

**TINJAUAN ASPEK KEAMANAN  
INVESTASI BAGI HASIL BAGI  
KEPENTINGAN INVESTOR  
(KASUS PT. QURNIA SUBUR ALAM RAYA)**

Oleh:

**RATNA NURHAYATI, SH, M.Hum  
NIP. 132205566**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TERBUKA  
2004**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Makalah dengan

Judul : TINJAUAN ASPEK KEAMANAN INVESTASI BAGI HASIL BAGI  
KEPENTINGAN INVESTOR

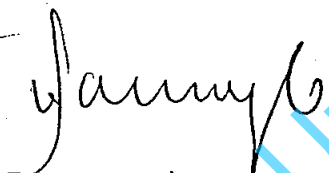
Oleh : Ratna Nurhayati, S.H.,M.Hum

NIP : 132 205 566

Ini telah ditelaah dan disetujui secara materi oleh Ahli Materi.

Mengetahui

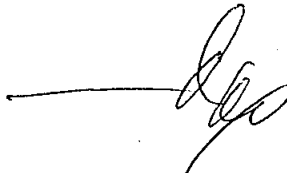
Kajur Ilmu Administrasi,



Drs. Darmanto, M.Ed

NIP. 131 602 651

Ahli Materi,



Drs. Mirza Pahlevi, MM

NIP. 132 044 756

## I. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan bulan Agustus 2002, banyak media massa yang memberitakan mengenai kasus PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT.QSAR). Perusahaan ini didirikan tahun 1997, bergerak di bidang usaha agribisnis dengan sistem bagi hasil, memiliki sekitar 6000 investor dengan jumlah dana yang tertanam mencapai sekitar 500 milyar. (Kompas, 23 Agustus 2002)

Pada umumnya para investor menanamkan uangnya di perusahaan ini setelah mendapat informasi dari orang yang dikenalnya tentang perusahaan yang menjanjikan keuntungan besar. Melalui promosi dengan menghadirkan para pejabat tinggi ke lokasi perusahaan, investor percaya kalau perusahaan tersebut hebat dan aman. Sejumlah pejabat yang pernah datang mengunjungi antara lain, Wakil Presiden Hamzah Haz, Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua DPR Tosari Widjaya. Foto-foto kunjungan mereka juga dimuat di tabloid milik PT.QSAR. Para investor ini tertarik janji bagi hasil yang sangat besar. Misalnya, jika investor memiliki uang Rp. 42 juta dan diinvestasikan dalam penggemukan sapi di tempat itu, maka dalam jangka waktu 3 bulan investor akan mendapat untung Rp. 7 juta. (Kompas, 23 Agustus 2002)

Ada juga investor yang mendapatkan informasi dari membaca buku yang berjudul *Proyek Proposal Investasi Agribisnis Alam Raya Tahun 2002* yang diterbitkan oleh PT.QSAR. Perusahaan ini antara lain menawarkan investasi untuk 17 komoditas pertanian seperti cabai, terung, jamur, madu dan lain-lain. Selain juga disebutkan soal pasar potensial di beberapa negara yang akan

dirambah perusahaan tersebut, beserta perhitungan bagi hasil tanaman yang ditawarkan, sebagai berikut :

**PERHITUNGAN BAGI HASIL TANAMAN  
YANG DITAWARKAN PT. QSAR**

Jumah populasi	: 3.000 pohon
Estimasi hasil panen	: 1,7 kg per pohon
Umur panen	: Lima bulan
Modal investasi	: Rp 20.000.000,-
Harga olahan	: Rp 6.500 per kg
Jumlah hasil olahan	: 5.100 kg
Hasil penjualan	: 33.150.000,-
Pengembalian modal	: Rp 20.000.000,-
Penghasilan bersih	: Rp 13.150.000,-
Bagi hasil untuk QSAR	: Rp 5.260.000 (40 persen)
Bagi hasil untuk investor	: Rp 7.890.000 (60 persen)

Sumber : PT. QSAR (*Kompas*, 6 September 2002)

Sejak terdengar kabar perusahaan tersebut kolaps karena tidak mampu mengembalikan seluruh dana investasi milik masyarakat, puluhan investor dari berbagai kota mendatangi lokasi perusahaan yang berada di desa Kadudampit,

Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi untuk menyita aset-aset yang masih tersisa karena mereka cemas uang yang sudah mereka investasikan tidak akan kembali. (*Kompas*, 23 Agustus 2002)

Agar para investor tidak bertindak sendiri-sendiri, Forum Komunikasi Investor beberapa kali melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya dibuatlah angket untuk mengetahui keinginan para investor apakah usaha agribisnis ini akan diteruskan atau tidak. Setelah dilakukan penyebaran angket, sebagian besar dari investor memilih agar usaha agribisnis tersebut diteruskan (*Kompas*, 22 September 2002).

## **II. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini bukan mengenai apakah usaha agribisnis ini dapat diteruskan atau tidak, tetapi mengenai bagaimana agar para investor tersebut aman menanamkan uangnya di PT.QSAR?

## **III. Pembahasan**

Untuk menjawab permasalahan di atas, berikut ini akan dibahas mengenai investasi secara umum, investasi bagi hasil dan kasus PT.QSAR.

### **A. INVESTASI**

Investasi merupakan suatu kebutuhan, bisa kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan jangka panjang. Hal ini tergantung pada pertimbangan investor,

apabila investasi itu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, maka investor akan menanamkan modalnya pada obyek investasi yang berjangka pendek dan sebaliknya.

Sebelum menanamkan uangnya, investor harus melakukan tahapan investasi sebagai berikut :

1. investor harus mengetahui karakteristik dari obyek–obyek investasi, apakah merupakan investasi langsung atau tidak langsung, investasi riil atau finansial dan sebagainya.
2. setelah mengetahui karakteristik dari obyek investasi, investor menentukan tujuan investasi apakah untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang.
3. setelah menentukan tujuan investasinya, investor menetapkan pilihan investasinya.

Untuk dipahami bahwa investasi adalah kegiatan beresiko. Penyelenggara investasi yang membutuhkan sokongan dana dari pihak lain sebenarnya dalam rangka berbagi resiko, bukan berbagi keuntungan (*Kompas, 8 September 2002*).

Investasi juga mengenal logika, bagaimana investasi itu dilakukan. Logika bagaimana penyelenggara mengelola resiko yang melekat pada jenis investasi itu (*Kompas, 28 Agustus 2002*).

Oleh karena itu dalam investasi tentu harus ada aturan main yang mengatur hak dan kewajiban dan posisi antara pemilik dana (investor) dan pihak yang mendapatkan dana (penerima/penyelenggara investasi).

Jadi yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi adalah faktor resiko dan waktu. Karena investasi itu kegiatan yang beresiko, maka investor harus memperhatikan resiko yang sekecil-kecilnya. Selain resiko, faktor waktu juga perlu mendapat perhatian, apakah keuntungan investasi itu berbanding seimbang dengan waktu yang ditempuh.

Menurut salah seorang pengamat investasi dan keuangan, Elvyn G. Masassya, untuk mengukur apakah sebuah investasi memiliki prospek keuntungan atau tidak, ada beberapa ukuran kelayakan sebagai berikut (*Kompas*, 8 September 2002) :

1. aspek legalitas usaha, untuk meneliti apakah sebuah lembaga penyelenggara kegiatan investasi dijalankan secara sah atau tidak.

Kebanyakan perusahaan memang memiliki dasar hukum berupa perseroan terbatas (PT). Tetapi, jangan lupa, itu cuma dasar hukum perusahaan. Sementara, untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu harus pula mendapatkan izin dari instansi terkait yang berwenang. Bila lembaga itu menghimpun dana dari masyarakat, ia mesti memiliki izin usaha sebagai bank atau paling tidak koperasi simpan pinjam. Itu bila dana dikelola dalam bentuk simpanan, atau masyarakat menjadi penabung di lembaga itu. Sementara bila lembaga itu tidak berbentuk lembaga keuangan seperti bank dan atau koperasi, bisa saja menghimpun dana dari masyarakat namun mesti mengikuti kaidah pasar modal. Artinya, perusahaan penyelenggara investasi itu menerbitkan surat berharga. Dan itu mesti mendapatkan persetujuan Bapepam. Surat berharga yang diterbitkan juga tidak bisa sembarangan. Ada

aturan main yaitu berapa lama jangka waktu surat berharga tersebut, berapa tingkat bunganya, dan lain sebagainya.

Disisi lain, lembaga tadi harus pula menerbitkan prospektus atau info memo yang memuat informasi, akan diapakan dana yang dihimpun itu. Di situ juga tercantum berbagai resiko kegiatan investasi yang dilakukan. Pola yang lain yaitu lembaga penyelenggara investasi itu menjual sahamnya kepada publik. Artinya, masyarakat yang menanamkan dananya akan diperlakukan sebagai pemegang saham.

Bila ada lembaga penyelenggara investasi yang tidak mengikuti kaidah tersebut, artinya tidak memberlakukan posisi investor dalam status yang jelas, apakah sebagai kreditur, pemegang surat berharga, atau pemegang saham, perlu dipertanyakan lebih lanjut.

2. Harus jelas siapa penyelenggara investasi. Dalam konteks "siapa" tersebut, kerap kali penyelenggara investasi memasang nama-nama populer. Padahal, nama terkenal belum tentu ada relevansinya dengan kegiatan investasi yang dijalankan. Ini hanya *gimmick marketing* saja untuk mempengaruhi psikologis masyarakat. Konkretnya, tidak ada jaminan dari orang terkenal itu untuk mengganti uang investor kalau terjadi apa-apa dengan investasi yang dijalankan.

3. Mekanisme pengelolaan dana investasi harus transparan.

Pada umumnya penyelenggara investasi membuat simulasi perhitungan keuntungan untuk menarik dana masyarakat. Misalnya, disebutkan bila Anda menanam dana Rp. 10 juta dalam kurun waktu enam bulan, Anda akan



mendapatkan keuntungan sekian persen. Kemudian setelah enam bulan maka total pokok plus keuntungan akan berlipat menjadi sekian juta.

Informasi perhitungan seperti itu bukanlah transparansi. Itu cuma iming-iming. Transparansi dalam mekanisme bisnis investasi, misalnya agribisnis, adalah menyangkut aktivitas *on farm* dan *off farm*. Artinya, ada keterbukaan mengenai kegunaan dana dengan kebutuhan investasi. Bila membuat kebun tomat, misalnya, harus jelas berapa biaya untuk satu hektar kebun tomat, berapa pohon tomat yang ditanam, berapa buah dari setiap pohon tomat. Ada perhitungan biaya investasi, lalu ada pula perhitungan harga pokok produksi. Kemudian, berapa perkiraan harga jual per ton tomat. Dari situ bisa diketahui perkiraan keuntungannya. Selain itu proses produksinya sendiri bisa dimonitor. Juga jalur distribusi, siapa pemasoknya, siapa pembelinya, bagaimana penyimpangannya. Jadi ada rencana usaha, ada pula pengelolaan risikonya. Bila semua itu tidak bisa diakses atau diverifikasi ke pihak terkait, maka kegiatan investasi seperti itu perlu dicurigai.

#### 4. Penyelenggara investasi mesti bersifat *auditable*.

Kegiatan investasi bagi hasil adalah kegiatan yang seharusnya memiliki akuntabilitas publik karena menggunakan dana masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggara investasi mesti bisa diaudit seluruh kegiatannya, termasuk aspek keuangannya. Bagaimana perusahaan tersebut membuat pembukuan, arus uang tunai dan lain sebagainya. Intinya, dana yang dihimpun dari masyarakat mesti teralokasi dalam aset dan biaya yang jelas. Dan itu hanya bisa diketahui jika dilakukan audit oleh akuntan publik secara reguler.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa investasi itu merupakan suatu kebutuhan. Oleh karena merupakan suatu kebutuhan, maka perlu diperhatikan aspek pengamanannya. Pengamanan investasi bisa untuk kepentingan investor dan untuk kepentingan penerima investasi. Untuk menjawab permasalahan di atas, dalam makalah ini hanya akan dibahas pengamanan investasi untuk kepentingan investor.

Pengamanan investasi dari sisi kepentingan investor adalah uang yang ditanamkan harus kembali utuh dan bertambah (*high return*), *High return* ini memerlukan pertimbangan atau perhitungan ekonomi dan manajemen, sedangkan hukum mengamankan pertimbangan-pertimbangan tadi.

## **B. INVESTASI BAGI HASIL**

Menurut Adler Haymans Manurung, seorang Direktur Fund Management PT. Nikko Securities Indonesia, Investasi bagi hasil adalah usaha yang dikembangkan oleh satu pihak atau beberapa pihak di mana pemilik dana yang masuk akan memperoleh hasil dari investasinya di masa mendatang berdasarkan hasil dari usaha tersebut (*Kompas, 15 September 2002*).

Prinsip investasi bagi hasil yang benar adalah *profit-loss sharing*. Artinya, keuntungan dibagi bersama dan kerugian pun juga ditanggung bersama. (*Kompas, 8 September 2002*)

Adler Haymans Manurung memberikan ciri-ciri investasi bagi hasil sebagai berikut (*Kompas, 15 September 2002*):

1. Hasil yang diperoleh pemilik dana besarnya proporsional mengikuti keuntungan yang diperoleh atas kesepakatan bersama pemilik dana.

Misalnya, keuntungan hasil usaha sebesar Rp. 1 Milyar dan sepakat dibagi sebesar Rp. 750 juta, maka investor yang memasukkan dananya Rp. 300 juta dari Rp. 3 milyar (investasi 10 persen) pada saat bagi hasil memperoleh bagian 75 juta ( 10 persen dari Rp. 750 juta).

Namun investasi yang dijanjikan hasilnya, *bukan* merupakan investasi bagi hasil. Misalkan investasi sebesar Rp. 50 juta akan memperoleh hasil sebesar Rp. 5 juta setelah dua bulan dan bulan ketiga sampai bulan keenam akan mendapatkan Rp. 2,5 juta dan pokoknya Rp. 50 juta pada bulan keenam. Artinya, selama enam bulan investasi Rp. 50 juta akan memperoleh hasil sebanyak Rp. 15 juta atau 30 persen dalam enam bulan dan bila disetahunkan sebesar 60 persen. Hasil diatas tidak memperlihatkan berapa keuntungan dari hasil usaha sehingga bukan investasi bagi hasil namanya.

2. Bila usaha tersebut membutuhkan dana maka dana dapat diperoleh dari kesepakatan bersama pemilik dana awal atau dana segar baru dari pihak lain.

Masuknya investasi baru kemungkinan memberikan pembagian yang berbeda dari pemilik dana awal dan biasanya atas kesepakatan bersama. Biasanya segala kesepakatan dilakukan dengan notaris agar tidak terjadi keributan di belakang hari.

3. Bila usaha yang dikembangkan mengalami masalah atau tidak berhasil karena situasi bencana, maka kerugian yang akan ditanggung pemilik dana yaitu sebesar dana yang dimilikinya hilang.

Bila dana yang dimasukkan ke dalam usaha tersebut ternyata dipergunakan pengelola tidak sesuai dengan kesepakatan pemilik dana, maka pengelola dana dapat disebut melakukan tindakan pidana dan pemilik dana dapat melaporkan pengelola tersebut kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya. Bila pemilik dana tidak mempunyai legalitasnya, maka pemilik dana hanya dapat menagih dana tersebut sebagai piutang dan kasusnya diselesaikan secara perdata.

Lebih lanjut Adler Haymans Manurung menjelaskan, investor yang ingin melakukan investasi bagi hasil harus memperhatikan (*Kompas*, 15 September 2002) :

1. Jenis usaha yang akan dikembangkan.

Bila investor tidak memahami jenis usaha tersebut, maka investor jangan berinvestasi bagi hasil. Biasanya investasi bagi hasil lebih menarik pada jenis usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat dan permintaannya sangat jelas.

2. Catatan perjalanan bisnis.

Pihak yang mengajukan tawaran investasi bagi hasil harus mempunyai catatan perjalanan bisnis yang baik (harus berpengalaman di bidangnya).

3. Nilai investasi.

Nilai investasi bagi hasil yang dilakukan tidak terlalu tinggi

#### 4. Jangka waktu investasi.

Dalam investasi bagi hasil, jangka waktu investasinya tidak terlalu lama.

#### 5. Jumlah pemilik dana.

Sebaiknya dalam berinvestasi bagi hasil tidak melebihi dari 10 pihak.

#### 6. Melakukan investigasi.

Sebelum melakukan investasi, sebaiknya melakukan investigasi ke berbagai pihak terutama ke departemen yang mengurus usaha tersebut.

### C. KASUS PT.QSAR

PT. QSAR memang telah memproduksi berbagai jenis sayuran, bunga, dan produk pertanian lainnya secara sukses (*Kompas*, 6 September 2002). Pengertian sukses di sini yaitu, perusahaan bisa menanam dan ada hasilnya. Tanam biji tomat ke luar tomat, namun mereka tidak sukses untuk mencapai "target mimpi" yang ditawarkan di dalam buku itu, yaitu *pertama*, soal produktivitas. Sebagai ilustrasi kita ambil contoh komoditas cabai merah besar (big chili). Di dalam buku itu disebutkan estimasi produktivitas sebesar 1,7 kg cabai per pohon. Berawal dari estimasi ini kemudian dikalikan dengan banyaknya pohon dalam satu luasan lahan, yaitu 3.000 pohon dan menurut mereka bisa menghasilkan 5.100 kg cabai merah. Tidak jelas dari mana dasar hitungan itu ke'uar, khususnya mengenai kepastian produktivitas yang mencapai 1,7 kg per pohon dan apakah bisa dirata-rata.

Ditambah lagi, estimasi 3.000 pohon itu dianggap sebagai angka tetap yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil yang akan diberikan kepada calon

investor. Perusahaan itu pun menjamin investor tak akan rugi karena pohon yang mati tetap diperhitungkan dalam bagi hasil. Penawaran pola bagi hasil ini jelas hal yang menggelikan bagi mereka yang sangat paham soal agrobisnis karena perusahaan menawarkan suatu kepastian. Dalam dunia agrobisnis tidak ada yang namanya kepastian yang ada justru ketidakpastian, dan itu artinya tidak ada target. Ketidakpastian itu selalu muncul setiap kali mereka menanam atau memulai usaha peternakan karena yang diurus itu adalah makhluk hidup yang mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan. Sedikit kurang air mereka akan tumbuh lambat, sebaliknya terlalu banyak masukan senyawa kimia tumbuhan itu akan mati. Para agrobisnis ini sadar bahwa investasi di perkebunan adalah bisnis yang penuh ketidakpastian harga fluktuatif hasil panen.

Kedua adalah soal harga jual komoditas. Kembali kita ambil contoh komoditas cabe. Dalam proposal itu PT QSAR membuat estimasi harga Rp 6.500 per kg dan kalau hasil panen dikalikan dengan perkiraan harga, maka keuntungan investor adalah Rp 13.150.000. Nilai keuntungan itu bisa diperoleh sepanjang harga cabai stabil Rp. 6.500 per kg.

Pertanyaannya adalah adakah jaminan harga stabil? Jawabnya pasti tidak, sebab fakta selama ini membuktikan produk agro-industri sensitif terhadap perkembangan pasar. Begitu suplai tersendat, harga pun melonjak tajam. Sebaliknya, jika suplai membanjir, harga pun langsung anjlok. Kondisi ini belum memperhitungkan faktor alam yang membuat tanaman mengalami gagal panen dan ulah tengkulak yang suka mempermainkan harga ditingkat produsen.

Tampaknya faktor ini terabaikan investor karena mereka lebih tergiur oleh janji dan jaminan yang diberikan oleh PT QSAR. Apalagi PT QSAR menulis secara tegas perhitungan harga adalah harga tetap, agar memudahkan semua pihak untuk melakukan kalkulasi bisnis. Selain itu, PT. QSAR juga menjamin modal investor tidak akan hilang jika terjadi gagal panen. Dalam proposal tersebut disebutkan, selama bukan karena faktor alam, seluruh kerugian itu menjadi risiko PT. QSAR.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa investasi itu mengenal logika. Apabila dikaitkan dengan kasus PT.QSAR ini, terlihat bahwa investasi agribisnis yang dijalankan perusahaan tersebut tidak masuk akal. Tidak jelas dari mana dasar hitungan mengenai kepastian produktivitas yang mencapai 1,7 kg per pohon. Ditambah lagi, estimasi 3.000 pohon yang dianggap sebagai angka tetap yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil yang akan diberikan kepada calon investor. Selain itu, masalah kepastian harga jual cabai Rp. 6.500 - per kg. Hal tersebut tidak mungkin sebab fakta selama ini membuktikan tidak ada jaminan bahwa harga cabai dapat stabil.

Prinsip investasi bagi hasil yang benar adalah *profit-loss sharing*. Artinya, keuntungan dibagi bersama dan kerugian pun juga ditanggung bersama. Investasi yang tawarkan PT.QSAR tidak mengikuti prinsip tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam proposal tersebut yang menyebutkan, selama bukan karena faktor alam, seluruh kerugian menjadi risiko PT. QSAR sedangkan pengelolaan resiko yang akan ditanggungnya tidak dijelaskan.

Hal yang mengherankan lainnya yaitu mekanisme operasional PT. QSAR itu sendiri. Perusahaan ini adalah perseroan terbatas yang tentunya tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan memiliki izin sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. Tetapi dalam praktiknya, QSAR sudah melakukan kegiatan penghimpunan dana. Padahal kalau perusahaan di sektor riil melakukan penghimpunan dana langsung dari masyarakat, mestinya dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan, seperti surat berharga, apakah itu obligasi atau minimal *promissory notes*. Kenyataannya QSAR tidak menggunakan media semacam itu, bahkan QSAR juga tidak memiliki izin untuk menghimpun dana masyarakat. (*Kompas*, 28 Agustus 2002)

#### IV. Penutup

Agar para investor aman menanamkan uangnya di PT.QSAR, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Investor harus mengetahui karakteristik obyek investasinya di PT.QSAR yaitu bahwa dalam dunia agrobisnis tidak ada yang namanya kepastian yang ada justru ketidakpastian, dan itu artinya tidak ada target. Ketidakpastian itu selalu muncul karena yang diurus itu adalah makhluk hidup yang mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan.
2. Prinsip investasi bagi hasil adalah *profit-loss sharing*. Jadi sebelum menginvestasikan uangnya di PT.QSAR, harus memikirkan faktor resiko dan waktu. Apalagi dalam dunia agrobisnis itu yang ada justru ketidakpastian,



maka investor harus memperhatikan resiko yang sekecil-kecilnya. Selain itu, apakah keuntungan investasi itu berbanding seimbang dengan waktu yang ditempuh.

3. Investor harus memikirkan aspek legalitas usaha. Meskipun QSAR telah memiliki dasar hukum berupa perseroan terbatas (PT). Tetapi, untuk menghimpun dana dari masyarakat harus mendapatkan izin dari instansi terkait yang berwenang. Sekarang ini banyak perusahaan yang berizin SIUP berani menghimpun dana masyarakat, sedangkan SIUP hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang.
4. Posisi investor dalam PT. QSAR statusnya harus jelas, apakah sebagai kreditur, pemegang surat berharga, atau pemegang saham. Dengan kata lain, harus ada aturan main yang mengatur hak dan kewajiban dan posisi investor dengan PT.QSAR sebagai penerima/penyelenggara investasi.
5. Investasi itu mengenal logika, sehingga pola bagi hasil yang ditawarkan PT.QSAR harus rasional. Hasil yang diperoleh investor besarnya harus proporsional mengikuti keuntungan yang diperoleh PT.QSAR atas kesepakatan bersama para investor. Misalnya, keuntungan hasil usaha sebesar Rp. 1 Milyar dan sepakat dibagi sebesar Rp. 750 juta, maka investor yang memasukkan dananya Rp. 300 juta dari Rp. 3 milyar (investasi 10 persen) pada saat bagi hasil memperoleh bagian 75 juta (10 persen dari Rp. 750 juta), dan seterusnya.

## V. Kepustakaan

Adler Haymans Manurung, *Investasi Bagi Hasil*, (Kompas, 15 September 2002)

Elvyn G. Masassya, *QSAR Puncak Gunung Es Problema Investasi Bagi Hasil*, (Kompas, 28 Agustus 2002)

Elvyn G. Masassya, *Tentang Investasi Bagi Hasil "Imitasi"*, (Kompas, 8 September 2002)

Ambruknya PT. QSAR Berawal dari Agrobisnis Kalkulator, (Kompas, 6 September 2002)

*Investor Pilih Usaha PT. QSAR Dilanjutkan*, (Kompas, 22 September 2002).

*QSAR Kolaps, Ribuan Investor Berebut Aset*, (Kompas, 23 Agustus 2002)